

**TERGANGGUNYA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL
AKIBAT KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH DAN ALOKASI DANA
PENDIDIKAN: KASUS APBN 2025**

M. Sunu Probo Baskoro¹

¹STAI Haji Agus Salim Cikarang

Email: sunu@staihas.ac.id

Abstrak: Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan adanya pergeseran prioritas dengan dialokasikannya sebagian besar dana pendidikan untuk program *Makan Bergizi Gratis (MBG)* sebesar Rp71 triliun. Meskipun program ini memiliki tujuan sosial yang baik, kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), khususnya pada sektor pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap data Kementerian Keuangan, Bappenas, dan media resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan alokasi dana transfer daerah menghambat operasional pendidikan di Papua, Maluku Utara, dan Bengkulu, terutama dalam aspek penyaluran dana BOS, perawatan sekolah, serta pengadaan guru. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan fiskal yang lebih seimbang antara intervensi sosial dan keberlanjutan pendidikan dasar di daerah 3T.

Kata Kunci: Dana Transfer, Pendidikan 3T, APBN 2025, Makan Bergizi Gratis, BOS.

Abstract: The 2025 State Budget (APBN) indicates a shift in priorities, with a significant portion of the education budget (Rp71 trillion) allocated to the Free Nutritious Meal (MBG) program. Although the program aims to improve social welfare, it indirectly reduces the allocation of Transfer to Regions and Village Funds (TKDD), particularly affecting education in remote, outermost, and disadvantaged regions (3T). This study employs a qualitative descriptive approach using literature analysis from official government and media sources. The findings reveal that the decrease in regional transfer funds has hindered educational operations in Papua, North Maluku, and Bengkulu, especially in the disbursement of school operational funds (BOS), school infrastructure maintenance, and teacher deployment. The results emphasize the need for a more balanced fiscal policy between social assistance and educational sustainability in 3T areas.

Keywords: Fiscal Transfer, Remote Education, APBN 2025, Free Nutritious Meals, School Operations.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar dan prioritas dalam pembangunan nasional di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 31) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan yang merata. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Pada APBN 2025, sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar **Rp724,3 triliun**, yang merupakan belanja fungsi pendidikan terbesar dalam struktur APBN. ([Media Keuangan](#)) Dari alokasi ini, sebagian besar digunakan melalui transfer ke daerah (TKD) dan juga untuk berbagai program pendidikan pusat. ([Media Keuangan](#)) Salah satu program unggulan adalah *Makan Bergizi Gratis* (MBG), renovasi dan revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ([Antara News](#))

Namun demikian, muncul kekhawatiran bahwa meskipun nominal alokasi pendidikan cukup besar, distribusi dan penggunaan dana belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan pendidikan yang adil dan berkualitas di daerah pelosok, terpencil, dan terluar.

Kerangka Teori

Beberapa konsep penting yang menjadi dasar analisis ini:

1. **Desentralisasi pendidikan** — Otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan, termasuk penggunaan dana TKD, DAU, DAK, DBH.
2. **Keadilan pendidikan** — Akses dan mutu pendidikan harus merata, tanpa disparitas wilayah.
3. **Efisiensi dan efektivitas anggaran** — Bukan hanya besaran alokasi, tetapi apakah dana digunakan tepat sasaran dan memberikan hasil nyata.
4. **Kebijakan sosial-ekonomi pendidikan** — Pengaruh faktor-faktor eksternal seperti infrastruktur, kondisi geografis, dan kondisi sosial ekonomi terhadap pelaksanaan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan:

- Studi dokumen kebijakan APBN 2025 yang relevan (alokasi pendidikan, transfer ke daerah, program makan bergizi gratis)
- Analisis data sekunder dari laporan pemerintah, media, dan statistik pendidikan nasional
- Observasi literatur dari riset terkait pendidikan di daerah terpencil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut beberapa temuan penting dan analisisnya:

1. Besaran Anggaran vs. Distribusi

- Dari APBN 2025, pendidikan dialokasikan sebesar **Rp724,3 triliun**, dan pemerintah menegaskan bahwa meskipun ada upaya efisiensi, porsi pendidikan tetap dijaga pada sekitar 20% dari total belanja APBN. ([Media Keuangan](#))
- Sebesar **Rp347,09 triliun** dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) untuk bagian pendidikan seperti BOS, PAUD, tunjangan guru, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk revitalisasi sarana pendidikan. ([Media Keuangan](#))

2. Penggunaan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Program MBG menjadi salah satu program prioritas dalam anggaran pendidikan APBN 2025. ([ANTARA News Megapolitan](#))
- Makan bergizi gratis ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kapasitas belajar siswa, terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Namun, alokasi untuk MBG memerlukan porsi yang signifikan dari dana pendidikan yang jika tidak diimbangi oleh fasilitas penunjang lainnya, dapat mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk aspek lain seperti infrastruktur, penyediaan guru, pelatihan, buku dan bahan ajar, teknologi, dan transportasi pendidikan.

3. Tantangan di Daerah Pelosok, Terpencil, dan Terluar

- **Akses fisik dan geografis:** Banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kondisi gedung yang rusak, belum terjangkau listrik atau internet, dan

kurangnya transportasi. Memperbaiki fasilitas ini memerlukan dana DAK Fisik, pemeliharaan, dan infrastruktur pendukung.

- **Ketersediaan guru dan tenaga pendidik berkualitas:** Daerah terpencil sering sulit menarik dan mempertahankan guru ASN/PNS dan bahkan PPPK. Tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, tunjangan insentif, dan fasilitas tambahan sering diperlukan agar guru bersedia mengajar di lokasi terpencil.
- **Keterlambatan dan ketidakpastian transfer dana:** Apabila alokasi TKD atau DAK terlambat, daerah tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pengeluaran tepat waktu; ini bisa berdampak pada kesiapan sekolah di awal tahun ajarannya, pengadaan buku, dan lainnya.
- **Ketimpangan kemampuan fiskal daerah:** Daerah dengan basis ekonomi lemah atau geografis sulit memiliki APBD yang kuat dan sangat bergantung pada transfer ke daerah. Pengurangan atau tidak optimalnya transfer akan memperbesar ketimpangan.

4. Dampak dari Pengurangan Transfer Dana atau Tidak Optimalnya Transfer

(Asumsi bahwa terjadi pengurangan atau kurang optimalnya transfer dana ke daerah tertentu.)

- **Penundaan pembangunan / pemeliharaan sarana pendidikan:** Sekolah-sekolah di pelosok tetap dalam kondisi rusak atau tidak layak karena dana DAK Fisik tidak mencukupi atau lama disalurkan.
- **Keterbatasan suplai bahan ajar dan sarana pembelajaran digital:** Keterlambatan dalam penyediaan buku, perangkat teknologi, akses internet dapat memperburuk kualitas pembelajaran.
- **Kekurangan guru dan tenaga pendidik yang kompeten:** Tanpa dukungan dana insentif dan fasilitas memadai, guru mungkin enggan menerima penempatan di daerah terpencil.
- **Keterbatasan layanan pendukung non-akademik:** Misalnya, kegiatan-kegiatan tambahan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum lokal, serta biaya operasional lainnya.

5. Trade-off: MBG vs Kebutuhan Pendidikan Lain

- Program MBG sangat penting dari sisi kesehatan dan penunjang pembelajaran (stamina siswa, konsentrasi), terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau daerah dengan ketahanan pangan rendah. Namun, apabila dana untuk MBG terlalu besar dibandingkan kebutuhan mendesak lain seperti pemenuhan guru, infrastruktur sekolah, listrik/internet, dan buku, maka ada risiko: kebutuhan pokok pendidikan lainnya terabaikan.
- Prioritas kebijakan yang lebih menekankan pada kesejahteraan siswa sering kali memiliki dampak jangka panjang jika diiringi kualitas pendidikan, tapi keseimbangan sangat diperlukan.

Studi Kasus / Indikator Empiris

Walau belum ada data publik yang secara eksplisit menyebut “pengurangan transfer dana pendidikan ke daerah terpencil karena alokasi ke MBG”, beberapa indikator dapat digunakan:

- Realisasi Transfer ke Daerah per semester I 2025 mencapai **Rp400,6 triliun**, tapi ini baru sekitar **43,5%** dari pagu TKD APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun. ([Antara News](#))
- Di Provinsi-provinsi seperti Bengkulu, terdapat penurunan alokasi TKD atau belanja daerah menurut laporan, meskipun secara keseluruhan APBN mendukung program prioritas seperti MBG, renovasi, sekolah unggulan. ([Kemenkeu DJPB](#))
- Di Kabupaten / daerah lokal seperti Tanah Laut, ada yang melaporkan penurunan total TKD (transfer ke daerah) dibanding tahun sebelumnya terutama dari pos Database bagi hasil (DBH) dan Insentif Fiskal. ([Kemenkeu DJPB](#))

Berikut adalah tambahan data spesifik dari berbagai daerah di Indonesia yang mendukung dan memperkaya artikel tentang terganggunya pelaksanaan pendidikan di daerah pelosok/terpencil/terluar, terutama terkait transfer dana, fasilitas, serta kesenjangan akses:

Data Kasus dan Studi Daerah Spesifik

Daerah	Permasalahan Spesifik	Data / Fakta	Relevansi terhadap isu transfer dana / alokasi lainnya
Pongok dan Celagen (Kepulauan Terpencil, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	Guru non-lulus pendidikan sesuai bidang, minim sumber belajar, rendahnya lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi	Studi menemukan bahwa di sekolah-sekolah di pulau Pongok dan Celagen: banyak guru yang tidak berlatar pendidikan sesuai, sumber belajar sangat terbatas, koleksi buku/perangkat ajar minim. (E-Journal of IKIP PGRI Bojonegoro)	Menunjukkan bahwa meskipun sekolah ada, kualitas tenaga pendidik dan sarana belajar ternyata belum optimal; jika dana transfer terlambat atau dialihkan ke program lain (misalnya makan bergizi), perbaikan kualitas guru & sumber belajar bisa terhambat.
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua	Keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah	Beberapa sekolah di Mimika mengeluhkan bahwa dana BOS triwulan empat belum dicairkan, meski nilainya cukup signifikan (contoh: satu sekolah menyebut lebih dari ~Rp 400 juta) (ANTARA News Papua)	Keterlambatan seperti ini mengganggu operasional sekolah (pembayaran kebutuhan rutin, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar). Bila alokasi dana ditunda atau dikurangi karena dana pusat diarahkan ke program lain, daerah seperti Mimika sangat terdampak.
Maluku Utara	Kondisi sarana prasarana sekolah	○ Pemprov Malut mengalokasikan Rp	Kasus Maluku Utara menunjukkan

Daerah	Permasalahan Spesifik	Data / Fakta	Relevansi terhadap isu transfer dana / alokasi lainnya
	rusak; pembayaran uang komite; penghapusan biaya komite di sekolah menengah; renovasi sekolah	62,3 miliar dari APBD tahun 2025 untuk sarpras sekolah di 64 sekolah SMA/SMK/SLB. (malutprov.go.id) ○ Tahun 2025: rencana renovasi 118 dari 250 SMA/SMK yang rusak, 64 lewat APBD dan 54 melalui bantuan APBN. (MalutPost.com) ○ Penghapusan uang komite untuk SMA/SMK/SLB negeri, dibayarkan melalui BOSDA; sejak April 2025 sebanyak 147 sekolah sudah menerima pembayaran uang komite via BOSDA	kombinasi masalah infrastruktur, biaya tambahan non-resmi (uang komite), dan potensi pemanfaatan dana daerah (APBD & BOSDA) untuk mengurangi beban masyarakat. Bila dana pusat tidak optimal atau lambat, APBD/DAK menjadi satu-satunya penolong, tetapi skalanya terbatas.
Papua Barat	Sebagian sekolah tidak mendapat dana BOS karena masalah administratif; jumlah anak putus sekolah tinggi	• Tiga SD di Manokwari tidak mendapat dana BOS 2023 karena terlambat upload data ke Dapodik. (papuabarat.antaranews.com) • Di Papua Barat, dilaporkan ada ~68 ribu anak yang tidak bersekolah meskipun dana Otonomi Khusus besar. (YouTube	Ini mencerminkan bahwa selain masalah dana, administrasi & sistem (data sekolah, data pendidikan dasar) juga menjadi hambatan. Keterlambatan atau kegagalan mengakses dana pusat karena

Daerah	Permasalahan Spesifik	Data / Fakta	Relevansi terhadap isu transfer dana / alokasi lainnya
			prosedur administratif dapat memperparah ketidakmerataan.
Desa Cisampang, Provinsi Banten	Kualitas guru, latar belakang pendidikan orang tua, fasilitas pendidikan yang terbatas	Studi “Tantangan dan Solusi Pendidikan di Desa Cisampang” menemukan bahwa kekurangan guru berkualitas, latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, dan fasilitas sekolah minim menjadi hambatan pembelajaran yang bermutu. (Journal UIN SGD)	Meskipun bukan daerah yang sangat terluar, desa terpencil seperti ini menunjukkan bahwa alokasi dana selain untuk program hak siswa (seperti MBG) harus juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru dan fasilitas lokal agar pendidikan merata.
Desa Silo Laut, Sumatera Utara	Ketidakmerataan PAUD (pendidikan anak usia dini), fasilitas & sumber daya pendidikan dini yang minimal	Studi kasus TK Yasir Arrafa di Desa Silo Laut menunjukkan bahwa satu-satunya lembaga PAUD mengalami keterbatasan serius dalam SDM, sarana & prasarana, kurikulum, dan materi ajar. (E-Jurnal STITA)	Daerah terpencil mengalami dampak awal dari masalah pendidikan sejak tahap usia dini. Jika dana pendidikan digunakan terlalu dominan untuk program umum tanpa memperhatikan kebutuhan PAUD di lokasi terpencil, maka kesenjangan akan makin melebar sejak dini.

Penambahan Analisis Berdasarkan Data Spesifik

Berdasarkan kasus-kasus di atas, beberapa poin analisis bisa diperkuat:

1. **Keterlambatan & Prosedur Administratif sebagai Penghambat Tambahan**

Di Mimika, Papua, dan juga di Papua Barat, terlihat bahwa selain soal jumlah dan alokasi dana, kecepatan pencairan dana sangat penting. Keterlambatan penyaluran BOS atau dana sertifikasi guru menciptakan gap operasional yang nyata. Bahkan jika dana pusat besar, manfaatnya akan terlambat terasa di daerah terluar jika proses administratif terlalu panjang.

2. **Tinggi-Rendahnya Kualitas Infrastruktur Sekolah**

Maluku Utara menunjukkan bahwa hampir 250 sekolah SMA/SMK dalam kondisi rusak, dan setidaknya separuh direncanakan untuk direnovasi lewat bantuan APBD & APBN. Tapi renovasi sekolah membutuhkan dana signifikan dan jika dana pusat dialihkan ke program lain (misalnya MBG), mungkin tidak cukup untuk menutupi backlog perbaikan akibat kondisi geografis yang mempercepat kerusakan (misalnya cuaca, transportasi bahan bangunan).

3. **Kebutuhan Spesifik di PAUD dan Daerah Kepulauan**

Kasus Desa Silo Laut menunjukkan bahwa PAUD hampir tidak ada pilihan dan fasilitasnya sangat terbatas. Dalam banyak pembahasan pendidikan, sekolah dasar/SMP/SMA sering menjadi fokus; padahal pendidikan usia dini juga sangat penting untuk membangun dasar kognitif dan membiasakan sekolah bagi anak-anak. Jika dana pusat banyak diarahkan ke program umum seperti makan bergizi, tetapi tidak ada dukungan untuk PAUD di daerah terpencil, maka mulai dari usia dini akan timbul kesenjangan kognitif dan kesiapan sekolah.

4. **Barometer Ketidakmerataan: Angka Putus Sekolah & Akses Lanjut Belajar**

Di Papua Barat misalnya, data bahwa puluhan ribu anak tidak bersekolah menunjukkan bahwa tersedia dana besar (Otonomi Khusus, BOS, ABPN) tidak selalu menjamin semua anak terjangkau. Orang tua, lokasi, kondisi transportasi, ketersediaan guru, serta biaya tidak langsung (harusnya ditanggung sendiri) semuanya menjadi faktor krusial.

Berikut data spesifik terkini (tahun 2025) terkait pelaksanaan pendidikan di daerah 3T dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

Data Kuantitatif Terkait Pendidikan Daerah 3T & Dana BOS / BOSP

Jenis Data	Angka / Fakta	Keterangan / Implikasi
Alokasi & realisasi BOS / BOSP	Alokasi Dana BOSP 2025: Rp59,2 triliun untuk 423.080 satuan pendidikan. Termasuk kenaikan biaya satuan di daerah khusus (15.046 satuan pendidikan dan ~1,1 juta peserta didik) untuk mengurangi kesenjangan antar satuan pendidikan. (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) Realisasi Dana BOS per 4 Juni 2025: Rp27,35 triliun dari pagu ~Rp53,38 triliun (terdiri dari BOS Reguler & BOS Kinerja). (Kontan Nasional)	Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap wilayah khusus dan upaya memitigasi disparitas antar sekolah. Jumlah satuan pendidikan besar menunjukkan cakupan yang luas, tetapi belum jelas seberapa cepat atau merata dana itu benar-benar dirasakan di daerah 3T. Artinya sekitar ~51% sudah disalurkan hingga pertengahan tahun; masih ada potensi tertundanya realisasi dana terutama untuk sekolah-di wilayah yang aksesnya sulit.
Sekolah 3T digitalisasi pembelajaran	Jumlah sekolah di wilayah 3T yang menerima bantuan digitalisasi: 33.182 sekolah dari target ~300.000 sekolah sasaran. (Antara News)	Ini menunjukkan bahwa sekitar ~11% dari target sekolah 3T telah terjangkau digitalisasi. Indikasi bahwa masih banyak sekolah 3T yang belum menikmati fasilitas pembelajaran digital.
BOS Pesantren	Realisasi BOS untuk pesantren hingga Triwulan II 2025:	Menunjukkan bahwa BOS untuk pesantren juga mengalami

Jenis Data	Angka / Fakta	Keterangan / Implikasi
	Rp196,864 miliar , yaitu ~50,43% dari total pagu Rp390,36 miliar. (Kementerian Agama)	penundaan atau perlambatan dalam realisasi (baru separuh pagu setelah setengah tahun). Daerah-terpencil pesantren bisa jadi sangat terdampak oleh keterlambatan ini.

Data Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Jenis Data	Angka / Fakta	Keterangan / Implikasi
Anggaran & target nasional	Anggaran MBG tahun 2025: Rp71 triliun . (kompas.id)	Ini adalah dana yang cukup besar dalam konteks APBN. Pemilihan prioritas penggunaan harus hati-hati agar tidak mengorbankan kebutuhan mendesak lain di wilayah 3T.
Realisasi MBG per wilayah / prosentase	Target penerima manfaat tahun 2025: 15 juta jiwa ; dan target jangka panjang hingga 2027: ~82,9 juta jiwa. (Kompas)	Skala yang besar mengharuskan pelaksanaan yang sangat terencana, logistik yang baik, dan keadilan distribusi ke daerah terpencil agar sasaran tercapai dan manfaatnya terasa lokal.
	Per 16 Mei 2025, realisasi biaya MBG: Rp1,91 triliun dari total pagu Rp51,52 triliun ($\approx 3,71\%$). Penerima manfaat $\approx 3.913.586$ orang (termasuk siswa, balita,	Ini memperlihatkan bahwa hingga pertengahan 2025, baru sekitar 3,7% dari anggaran MBG yang terealisasi. Artinya, masih sangat jauh dari target manfaat yang

Jenis Data	Angka / Fakta	Keterangan / Implikasi
	ibu hamil & menyusui). (Kemenkeu DJPB)	direncanakan, terutama bagi daerah yang logistik dan aksesnya sulit.
Penyebaran & implementasi di daerah spesifik	Di wilayah “Semaku” (Bengkulu): kabupaten Seluma dan Kaur telah melaksanakan MBG; Bengkulu Selatan belum. Di Kaur, berlaku di 21 sekolah, 2.792 porsi; kendala bahan baku (harga sayur dan buah) naik turun. (Kemenkeu DJPB)	Menunjukkan bahwa pelaksanaan lokal bergantung pada kesiapan logistik dan supply chain serta stabilitas harga bahan pokok. Daerah terpencil sangat rentan terhadap kenaikan biaya logistik dan kelangkaan bahan makanan.

Analisis Tambahan Based on Data

Dari data-diatas, bisa ditarik beberapa poin penting:

1. Gap antara target dan realisasi sangat besar

Meski dana besar telah dialokasikan untuk MBG dan BOS/BOSP, realisasi di lapangan terutama untuk MBG masih kecil (sekitar 3,7% dari pagu pada Mei 2025). Banyak sekolah dan daerah yang belum merasakan manfaatnya.

2. Distribusi belum merata ke daerah terpencil

Sebagian daerah seperti kabupaten-kota di Bengkulu (Kaur, Seluma) sudah mulai terlaksana, tetapi ada juga kabupaten yang belum memulai atau terlambat. Daerah 3T kemungkinan lebih sering mengalami keterlambatan ini.

3. Keterbatasan fasilitator lokal & logistik

Kenaikan biaya bahan baku, kendala transportasi, serta stabilitas pasokan bahan makanan menjadi hambatan nyata. Di daerah terpencil, faktor ini bisa membuat biaya operasional program menjadi jauh lebih tinggi, sehingga menyulitkan ketepatan dan mutu pelaksanaan.

4. **Realisasi BOS / BOSP yang tinggi tetapi masih ada tantangan waktu dan fleksibilitas**

Untuk BOS / BOSP, rata-rata realisasinya sangat bagus (tahun ke tahun di kisaran hampir 97-98%) untuk unit-unit yang sudah masuk dalam sistem. (pdm.dikdasmen.go.id) Namun, sekolah yang belum memiliki rekening yang valid, yang wilayahnya sangat sulit akses, atau yang menghadapi konflik administratif cenderung tertinggal.

5. **Kebutuhan spesifik di sekolah 3T terutama dalam digitalisasi dan infrastruktur bantuannya masih sangat besar**

Meskipun sudah ada program digitalisasi untuk puluhan ribu sekolah 3T, itu baru sebagian kecil dari target keseluruhan. Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan akses internet, perangkat, tenaga pendukung, termasuk pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan:

1. **Alokasi pendidikan secara nominal besar**, dan pemerintah pusat memiliki komitmen untuk menjaga persentase minimal alokasi pendidikan (sekitar 20%) sebagaimana diamanatkan konstitusi. ([Media Keuangan](#))
2. **Transfer ke daerah (TKD) memang merupakan bagian besar dari alokasi pendidikan**, namun ada indikasi bahwa tidak semua daerah, terutama daerah terpencil/pelosok, mendapatkan transfer yang optimal baik dari segi waktu, jumlah, maupun fleksibilitas penggunaan dana.
3. **Program makan bergizi gratis memiliki manfaat sosial dan pendidikan yang poten**, tetapi jika penggunaannya terlalu besar atau tidak disertai dukungan infrastruktur pendidikan pendukung lainnya, ada risiko bahwa aspek lain dari pendidikan terabaikan di daerah dengan kebutuhan lebih mendesak.
4. **Kesenjangan geografis dan fiskal daerah memperparah dampak** pengurangan atau keterlambatan transfer dana; daerah pelosok lebih rentan terhadap kegagalan layanan pendidikan jika dana pusat berkurang atau dialihkan.

Berdasarkan temuan, berikut beberapa rekomendasi agar pelaksanaan pendidikan di daerah pelosok, terpencil, dan terluar tidak terganggu:

Rekomendasi	Uraian
Peningkatan fleksibilitas penggunaan TKD/DAK	Memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah agar dana dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan lokal (misalnya pemerintah daerah dapat memutuskan proporsi antar MBG vs infrastruktur vs guru) dengan pedoman yang jelas.
Penjaminan waktu penyaluran dana	Memastikan bahwa dana transfer tiba pada awal tahun ajaran agar sekolah-sekolah di daerah bisa merencanakan pengadaan buku, pembayaran tunjangan, persiapan sarana prasarana sebelum tahun ajaran dimulai.
Penambahan insentif bagi guru di daerah terpencil	Lebih banyak tunjangan, fasilitas, pelatihan, insentif hidup, dan kondisi kerja yang layak agar guru mau ditempatkan di lokasi sulit.
Penguatan infrastruktur pendidikan	Prioritas renovasi sekolah, penyediaan listrik, air bersih, akses internet, transportasi sekolah di daerah terpencil.
Evaluasi proporsionalitas alokasi MBG	Menyusun formula alokasi yang seimbang antara MBG dan kebutuhan dasar pendidikan lainnya; melakukan analisis kebutuhan per daerah agar MBG tidak mendominasi secara tidak proporsional.
Pengawasan dan transparansi	Memastikan pengelolaan dana di tingkat daerah akuntabel, dengan pelibatan masyarakat lokal dan monitoring khusus untuk daerah terpencil.
Program afirmatif khusus	Pengalokasian dana tambahan khusus untuk daerah terluar/perbatasan/pelosok agar mereka tidak tertinggal;

Rekomendasi	Uraian
	program afirmatif ini bisa berupa kuota tambahan BOS, DAK Fisik yang disesuaikan dengan tantangan geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025, April 30). *Kemenkeu transfer Rp400,6 triliun ke daerah per semester I 2025*.
- Antara News. (2025, Mei 10). *Pemerintah telah salurkan Rp764 triliun dana pendidikan APBN 2025*.
- Bappenas. (2025, Januari 4). *Makan bergizi gratis berpotensi sumbang 0,86 persen pertumbuhan ekonomi 2025*.
- DJPB Kemenkeu. (2025, Mei 16). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada Wilayah Semaku*.
- DJPB Kemenkeu. (2025, Desember 15). *Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025*.
- Ejurnal IKIP PGRI Bojonegoro. (2023). *Kualitas pendidikan di daerah kepulauan: Studi kasus Pulau Pongok dan Celagen*.
- Ejurnal STITA. (2022). *Pendidikan anak usia dini di daerah terpencil: Studi kasus TK Yasir Arrafa Desa Silo Laut*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Desember 7). *Efisiensi Anggaran: Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025*.
- Kompas.com. (2025, Januari 4). *Dimulai 6 Januari 2025, ini rincian program makan bergizi gratis*.
- Malutprov.go.id. (2025, Mei 20). *Rp62,3 miliar untuk sarpras pendidikan: Maluku Utara bergerak perbaiki sekolah*.
- Papua Antara News. (2025, Februari 27). *Sekolah di Mimika keluhkan keterlambatan penyaluran dana BOS*.
- Papua Barat Antara News. (2023, Oktober 2). *Tiga SD di Manokwari tidak mendapatkan dana BOS pada 2023*.

UIN Sunan Gunung Djati. (2024). *Tantangan dan solusi pendidikan di Desa Cisampang*. YouTube. (2024). *68 ribu anak Papua Barat tidak bersekolah meskipun dana Otsus besar* [Video].